

Kamis
20
Mei 2021



Stock Market Indexes	Last	Change	1 Month	YTD	1 Year
Indonesia - JCI	5,760.58	▼ -1.27%	▼ -5.35%	▼ -3.65%	▲ 27.70%
Indonesia - LQ45	854.76	▼ -1.57%	▼ -5.83%	▼ -8.57%	▲ 29.42%
Indonesia - JII	548.21	▼ -1.89%	▼ -8.69%	▼ -13.04%	▲ 6.75%
US - Dow Jones	33,896.04	▼ -0.48%	▼ -0.89%	▲ 10.75%	▲ 37.80%
Europe - Stoxx 600	436.34	▼ -1.51%	▼ -1.39%	▲ 9.35%	▲ 27.74%
Asia ex. Japan - MXFEJ	813.48	▼ -0.23%	▼ -3.07%	▲ 1.67%	▲ 41.17%
Hong Kong - Hang Seng	28,593.81	▲ 1.42%	▼ -1.30%	▲ 5.00%	▲ 19.47%
Malaysia - KLCI	1,580.52	▼ -0.68%	▼ -1.73%	▼ -2.87%	▲ 12.08%
Philippines - PCOMP	6,245.71	▲ 0.02%	▼ -3.84%	▼ -12.31%	▲ 13.99%
Singapore - STI	3,104.21	▼ -1.22%	▼ -3.05%	▲ 9.16%	▲ 22.25%
South Korea - KOSPI	3,173.05	▲ 1.23%	▼ -0.80%	▲ 10.43%	▲ 63.80%
Taiwan - TWSE	16,132.66	▼ -0.08%	▼ -5.98%	▲ 9.50%	▲ 50.20%
Thailand - SET	1,562.24	▼ -0.29%	▲ 0.86%	▲ 7.54%	▲ 21.43%
Bond Index					
IBPA Indonesia Government Bond Total Return Index	342.46	▲ 0.01%	▲ 1.12%	▼ -0.10%	▲ 15.02%
Exchange Rate					
USD-IDR	14,290.00	▼ -0.12%	▲ 1.89%	▼ -2.84%	▲ 3.77%

Sumber: Bloomberg. Data per tanggal 19 Mei 2021.



Jokowi Minta DPR Segera Bahas Tax Amnesty Jilid II

residen Joko Widodo (Jokowi) telah mengirimkan surat kepada DPR untuk segera membahas Rancangan Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (RUU KUP). RUU yang telah masuk program legislasi nasional prioritas 2021 ini membahas beberapa hal terkait pungutan pajak di Indonesia. Selain kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan di dalam RUU KUP juga mengatur Pajak Penghasilan (PPH), pengurangan PPh badan, PPnBM, carbon tax, dan juga tax amnesty jilid II. Sebelumnya, kebijakan tax amnesty tertuang dalam UU No. 11/2016 tentang Pengampunan Pajak. Implementasi kebijakan ini adalah rekonsiliasi antara wajib pajak dan pemerintah. Dimulai pada Juli 2016, pemerintah telah mengantongi data deklarasi harta senilai Rp4.884,2 triliun yang Rp1.036,7 triliun di antaranya berasal luar negeri.

Bisnis Indonesia

Pemerintah akan tarik utang baru Rp 323,4 triliun di kuartal II-2021

Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko (DJPPR) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) menargetkan total penarikan utang kuartal II-2021 mencapai Rp 323,4 triliun. Jumlah tersebut terdiri dari surat utang negara (SUN) sebesar Rp 194,6 triliun dengan mengutamakan penerbitan SUN melalui lelang, penerbitan Samurai Bond, dan private placement yang dilakukan dengan tujuan khusus. Kemudian, melalui penerbitan utang melalui surat berharga syariah negara (SBSN) Rp 108,4 triliun utamanya melalui lelang, dan penerbitan sukuk valas. Lalu utang yang berasal dari pinjaman ditargetkan sebesar Rp 20,4 triliun. DJPPR menyampaikan pengadaan pinjaman tunai itu berasal dari World Bank, AIIB, KfW dan JICA. Selain itu, sumber pemberi pinjaman dapat berubah sesuai dengan progres negosiasi dan penyiapan dokumentasi. Sebagai informasi, total utang yang ditarik pemerintah sepanjang kuartal I 2021 mencapai Rp 414,98 triliun atau 24,3% dari target utang bruto 2021. Utang ini berasal dari SBN sebesar Rp 398 triliun dan penarikan pinjaman mencapai Rp 16 triliun.

Kontan

Investor Tunggu Rilis Nota Rapat The Fed, Harga SBN Mixed

Harga obligasi pemerintah atau Surat Berharga Negara (SBN) bervariasi pada perdagangan Rabu (19/5/2021), di tengah masih naiknya imbal hasil obligasi pemerintah Amerika Serikat (AS) jelang rilis hasil rapat bank sentral AS pada Rabu waktu setempat. Hasil dari rapat Komite Pasar Terbuka Federal (Federal Open Market Committee/FOMC) pada April akan dipublikasikan pada pukul 14:00 waktu setempat atau dini hari waktu Indonesia. Investor akan mengamati hasil rapat dari bank sentral Negeri Paman Sam tersebut untuk indikasi apa pun mengenai pandangan Fed tentang kenaikan inflasi dan kapan mungkin mulai merubah kebijakan *dovish*-nya menjadi *hawkish*.

CNBC Indonesia

Disclaimer: Dokumen ini dipersiapkan halnya sebagai informasi umum, dan mengenai tujuan investasi khusus, ketentuan perorangan dan kebutuhan khusus dari seseorang belum dipertimbangkan. Anda tidak harus mengandalkan dokumen ini sebagai saran investasi. Jika Anda mempunyai keingintahuan apapun tentang setiap produk investasi atau tidak yakin terhadap kesesuaian dari setiap keputusan investasi, Anda harus mencari nasihat keuangan tersebut dari penasihat profesional Anda yang tepat. Informasi yang dimuat dalam dokumen ini diperoleh dari sumber yang dapat dipercaya, namun Allianz tidak menjamin kelengkapan atau akurasi. Opini dan perkiraan yang diungkapkan dapat berubah tanpa pemberitahuan dan Allianz tegas menolak setiap dan semua tanggung jawab atas pernyataan dan jaminan, tersurat maupun tersirat, yang tercantum di sini, atau yang tidak dicantumkan.

